

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Penulis melakukan penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Kota Tasikmalaya. Dengan objek penelitian Inventarisasi Aset, Penilaian Aset, dan Legal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya).

##### **3.1.1 Sejarah Berdirinya Kota Tasikmalaya**

Kota Tasikmalaya adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat. Kota ini terletak pada  $108^{\circ} 08' 38'' - 108^{\circ} 24' 02''$  BT dan  $7^{\circ} 10' - 7^{\circ} 26' 32''$  LS di bagian Tenggara wilayah Propinsi Jawa Barat. Kota ini dahulunya adalah sebuah kabupaten, namun seiring dengan perkembangan zaman, maka terbentuklah dua bentuk pemerintahan yaitu Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintahan Kota Tasikmalaya.

Sejarah berdirinya Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonomi tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah kabupaten induknya. Sebelumnya, kota ini merupakan ibu kota dari Kabupaten Tasikmalaya, kemudian statusnya berubah menjadi kota administratif pada tahun 1976 ketika Bunyamin menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya, dan kemudian menjadi pemerintahan kota yang mandiri pada masa Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dipimpin oleh bupatinya saat itu H. Suljana W.H.

Sejarah lahirnya kota Tasikmalaya dimulai dengan diresmikannya Kota Administratif Tasikmalaya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1976 oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud. Peristiwa ini ditandai dengan penandatanganan prasasti yang sekarang terletak di depan gedung DPRD lama Kabupaten Tasikmalaya. Pada waktu yang sama dilantik pula Walikota Administratif pertama yaitu Drs. H. Oman Roosman oleh Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat H. Aang Kunaefi.

Pada awal pembentukannya, wilayah Kota Administratif Tasikmalaya meliputi 3 Kecamatan yaitu Cipedes, Cihideung dan Tawang dengan jumlah desa sebanyak 13 desa.

Berkat perjuangan yang dilakukan oleh Bupati Tasikmalaya dan jajarannya pada saat itu, Kol. Inf. H. SuIjana Wirata Hadisubrata (1996 – 2001) maka dirintislah pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan membentuk sebuah Tim Sukses Pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang diketuai oleh H. Yeng Ds. Partawinata SH. Melalui proses panjang akhirnya dibawah kepemimpinan Bupati Drs. Tatang Farhanul Hakim, pada tanggal 17 Oktober 2001 melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001, Pembentukan pemerintahan Kota Tasikmalaya sebagai pemerintahan daerah otonom yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI di Jakarta bersama-sama dengan kota Lhoksumawe, Langsa, Padangsidempuan, Prabumulih, Lubuk Linggau, Pager Alam, Tanjung Pinang, Cimahi, Batu, Sikawang dan Bau-bau. Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2001 pelantikan

Drs. H. Wahyu Suradiharja sebagai Pejabat Walikota Tasikmalaya oleh Gubernur Jawa Barat dilaksanakan di Gedung Sate Bandung.

Sesuai Undang Undang Nomor 10 Tahun 2001 bahwa wilayah Kota Tasikmalaya terdiri dari 8 Kecamatan dengan jumlah Kelurahan sebanyak 15 dan Desa sebanyak 54, tetapi dalam perjalanannya melalui Perda No. 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, desa-desa di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya berubah statusnya menjadi Kelurahan, oleh karena itu maka jumlah kelurahan menjadi sebanyak 69 kelurahan, sedangkan kedelapan kecamatan tersebut antara lain :

1. Kecamatan Tawang;
2. Kecamatan Cihideung;
3. Kecamatan Cipedes;
4. Kecamatan Indihiang;
5. Kecamatan Kawalu;
6. Kecamatan Cibeureum;
7. Kecamatan Mangkubumi;
8. Kecamatan Tamansari.

Namun pada saat ini, jumlah kecamatan bertambah menjadi 10 kecamatan. Penambahan dua kecamatan baru tersebut adalah Kecamatan Purbaratu dan Kecamatan Bungursari.

Pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya tak lepas dari peran serta semua pihak maupun berbagai stekholder di daerah Kota Tasikmalaya yang mendukung pembentukan tersebut. Tentunya dengan pembentukan Kota

Tasikmalaya harus ditindaklanjuti dengan menyediakan berbagai prasarana maupun sarana guna menunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Berbagai langkah untuk mempersiapkan prasarana, sarana maupun personil serta komponen-komponen lainnya guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tasikmalaya telah dilaksanakan sebagai tuntutan dari pembentukan daerah otonom itu sendiri.

Sebagai salah satu syarat Pemerintah Daerah Otonom diperlukan alat kelengkapan lainnya berupa Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Melalui Surat Keputusan No. 133 Tahun 2001 Tanggal 13 Desember 2001 Komisi Pemilihan Umum membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tasikmalaya (PPK-DPRD). Melalui proses dan tahapan-tahapan yang dilaksanakan PPK-DPRD Kota Tasikmalaya yang cukup panjang, maka pengangkatan anggota DPRD Kota Tasikmalaya disyahkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171/Kep.380/Dekon/2002 tanggal 26 April 2002, selanjutnya tanggal 30 April 2002 diresmikannya keanggotaan DPRD Kota Tasikmalaya untuk yang pertama kalinya.

Pada tanggal 14 November 2002 dilantiknya Drs. H. Bubun Bunyamin sebagai Walikota Tasikmalaya, pelantikan Walikota tersebut adalah sebagai puncak momentum dari pemilihan Kepala Daerah pertama di Kota Tasikmalaya sebagai hasil dari tahapan proses pemilihan yang dilaksanakan oleh Legislatif.

Berikut adalah pemegang jabatan Walikota Tasikmalaya dari terbentuknya kota administratif sampai saat ini:

1. Drs. H. Oman Roesman (1976-1985);

2. H. Yeng Ds. Partawinata (1985-1989);
3. Drs. R.Y.Wahyu (1989-1992);
4. H. Erdhi Hadhiana (1992-1999);
5. Drs. H. Bubun Bunyamin (1999-2007);
6. Drs. H. Syarif Hidayat, M.Si (2007-2012);
7. Drs. H. Budi Budiman (2012-2017);
8. Drs. H. Budi Budiman (2017-sekarang).

*Sumber : portal.tasikmalayakota.go.id.*

### **3.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Kota Tasikmalaya**

Visi dan Misi Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk tahun 2017- sekarang adalah sebagai berikut :

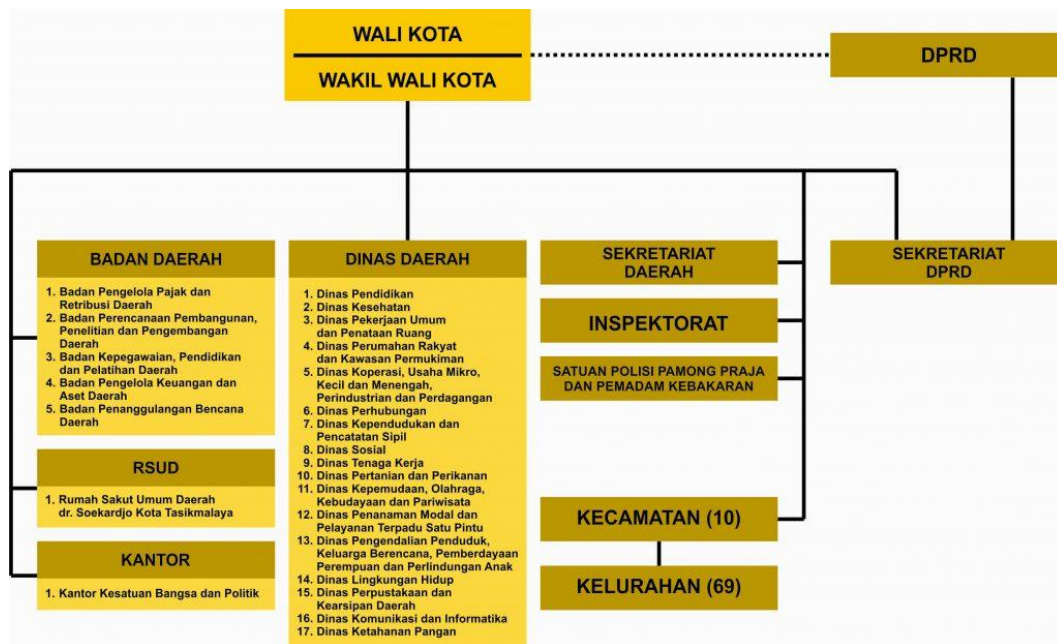
#### 1. Visi

"Kota Tasikmalaya yang religius, maju dan madani"

#### 2. Misi

- a) Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal.
- b) Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- c) Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat.
- d) Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- e) Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.

### 3.1.3 Struktur Pemerintahan Kota Tasikmalaya



**Gambar 3.1**  
**Struktur Organisasi Pemerintah Kota Tasikmalaya**

Sumber : [tasikmalayakota.go.id](http://tasikmalayakota.go.id)

### 3.2 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2016:2). Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif dan bertujuan untuk menguji keandalan suatu teori yang mampu menghasilkan suatu kesimpulan. Cooper (2014:146) menyatakan bahwa metode kuantitatif adalah metode penelitian yang mencoba untuk mengukur subjek penelitian dengan tepat.

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori (*explanatory research*) yakni penelitian yang berusaha menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen dengan variabel dependen melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. Selain itu, penelitian ini juga merupakan penelitian deskriptif.

Menurut Sugiyono (2016:53), menyebutkan bahwa definisi penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:

“Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan nilai variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri)”.

Penelitian ini disebut penelitian deskriptif karena terdapat rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri atau variabel yang berdiri sendiri, dan peneliti tidak membuat perbandingan variabel pada sampel yang lain, dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2018:35).

### **3.2.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Definisi variabel menurut Sugiyono (2018:38) adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan empat variabel dengan judul **“Pengaruh Inventarisasi Aset, Penilaian Aset, dan Legal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya”**. Keempat variabel tersebut terdiri dari variabel independen/eksogenus dan variabel dependen.

#### **1. Variabel Independen**

Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2018:39).

Dalam hal ini yang menjadi variabel independennya adalah Inventarisasi Aset (X1), Penilaian Aset (X2), dan Legal Audit (X3).

## 2. Variabel Dependen

Variabel Dependen adalah variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. (Sugiyono, 2018:39).

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Y).

Untuk lebih jelasnya mengenai variabel penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Operasionalisasi Variabel Penelitian Variabel	Definisi Variabel	Dimensi	Indikator	Ukuran	Skala
Inventarisasi aset (X1) Variabel independen	Inventarisasi aset adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.  (Permendagri No. 19 tahun 2016)	1. Inventarisasi fisik  2. Inventarisasi yuridis/legal  (Doli D. Siregar, 2004: 518-520)	1. Keberadaan fisik barang. 2. Kondisi aset  1. <i>Labelling</i> 2. Kelengkapan dokumen aset 3. Otorisasi/legalitas dokumen	Skor	Interval
Penilaian aset (X2) Variabel independen	Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.  (Permendagri No. 21 tahun 2018)	Penilaian Barang Milik Daerah dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.  (PP No. 27 tahun 2014)	1. Penilaian melibatkan jasa penilai independen/apraisal 2. Penilaian aset dalam neraca	Skor	Interval



Legal audit (X3) Variabel independen	Legal audit adalah satu lingkup pekerjaan manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan aset, identifikasi dan mencari solusi permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset.  (Doli D. Siregar, 2004: 519)	1. Inventarisasi status penguasaan aset  2. Identifikasi aset  3. Prosedur penugasan/ pengalihan aset  4. Tindakan hukum atas pelanggaran hak  (Doli D. Siregar, 2004: 518-520)	1. Kelengkapan dokumen penguasaan aset 2. Penggolongan status penguasaan/ penggunaan aset.  1. Klasifikasi jenis aset 2. Aset dimanfaatkan sesuai ketentuan  1. Pengalihan aset dilengkapi dengan dokumen 2. Pengawasan pengalihan aset 3. Pencatatan mutasi aset  1. Sanksi penggunaan aset 2. Sanksi material berupa penggantian kerugian	Skor	Interval
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Y) Variabel Dependen	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.  (PP No. 71 tahun 2010)	1. Relevan  2. Andal  3. Dapat dibandingkan  4. Dapat dipahami  (PP No 71 Tahun 2010 tentang SAP)	1. Memiliki manfaat untuk masa mendatang 2. Tepat waktu 3. Lengkap  1. Jujur 2. Dapat diverifikasi 3. Netral  1. Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya 2. Dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan yang sama  1. Dapat difahami oleh pengguna/ tidak bias 2. Menyediakan	Skor	Interval

## **3.2.2 Teknik Pengumpulan Data**

### **3.2.2.1 Jenis Data**

Berdasarkan variabel yang diteliti, maka metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang secara langsung bersumber dari responden tanpa ada perantara, dalam hal ini adalah dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner yang dihasilkan dari kuisisioner dan wawancara ke pihak Badan, Dinas, dan Kantor terkait. Juga diperoleh hasil pengumpulan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh melalui perantara. Sumber data yang dimaksud adalah dokumen-dokumen yang ada, buku-buku teks, jurnal-jurnal yang berhubungan langsung dengan kegiatan penelitian dan lain-lain.

### **3.2.2.2 Populasi Penelitian**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018:80).

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi penelitian yang penulis teliti adalah subjek yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan atau manajemen

aset daerah yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya yang disajikan dalam Tabel 3.2 berikut ini.

**Tabel 3.2**  
**Populasi Penelitian**

NO	Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah
1	Dinas Pendidikan
2	Dinas Kesehatan
3	RSUD Dr. Soekardjo
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
7	Dinas Perhubungan
8	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Dinas Lingkungan Hidup
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
11	Dinas Sosial
12	Dinas Tenaga Kerja
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
16	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
17	Sekretariat DPRD
18	Sekretariat Daerah
19	Kecamatan Kawalu
20	Kecamatan Tamansari
21	Kecamatan Mangkubumi
22	Kecamatan Cibeureum
23	Kecamatan Indihiang
24	Kecamatan Cihideung
25	Kecamatan Tawang
26	Kecamatan Cipedes
27	Kecamatan Purbaratu
28	Kecamatan Bungursari
29	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
31	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
32	Inspektorat
33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
34	Dinas Pertanian dan Perikanan
35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
37	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
38	Dinas Ketahanan Pangan

Sumber: *tasikmalayakota.go.id*

### 3.2.2.3 Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018:81).

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling ada dua yakni *probability sampling* dan *non probability sampling* (Sugiyono, 2018:81).

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pengambilan sampel *non probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2018:84).

Sampel yang akan dijadikan sumber data pada penelitian ini didasarkan pada jenis/pengelompokkan SKPD. Pengelompokkan SKPD yang menjadi sampel pada pemerintah kota tasikmalaya dibagi menjadi berikut ini:

**Tabel 3.3**  
**Pengelompokkan SKPD Kota Tasikmalaya**

Kelompok SKPD	Nama SKPD
Dinas	1. Dinas Pendidikan
	2. Dinas Komunikasi dan Informatika
	3. Dinas Lingkungan Hidup
	4. Dinas Pertanian dan Perikanan
	5. Dinas Kesehatan
	6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
	Pemukiman 8. Dinas perhubungan

---

	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</li> <li>10. Dinas Sosial</li> <li>11. Dinas Tenaga Kerja</li> <li>12. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>13. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>14. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu</li> <li>16. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah</li> <li>17. Dinas Ketahanan Pangan</li> </ol>
Badan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</li> <li>2. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah</li> <li>3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah</li> </ol>
Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Tamansari</li> <li>2. Kecamatan Kawalu</li> <li>3. Kecamatan Cibeureum</li> <li>4. Kecamatan Tawang</li> <li>5. Kecamatan Cipedes</li> <li>6. Kecamatan Purbaratu</li> <li>7. Kecamatan Mangkubumi</li> <li>8. Kecamatan Indihiang</li> <li>9. Kecamatan Cihideung</li> </ol>

---

	10. Kecamatan Bungursari
Lain-lain	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>2. Inspektorat</li> <li>3. RSUD dr. Soekardjo</li> <li>4. Sekretariat DPRD</li> <li>5. Sekretariat Daerah</li> <li>6. Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran</li> </ol>
<b>Jumlah</b>	<b>38 SKPD</b>

*Sumber : tasikmalayakota.go.id*

Metode ini menggunakan pendekatan *purposive sampling* (sampling bertujuan), yakni penentuan sampel atas dasar pertimbangan. Cara ini sering disebut sebagai pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan karena dalam pelaksanaan penelitian menggunakan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018:85).

Berikut ini merupakan beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Sampel merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tasikmalaya.
2. SKPD dijadikan sebagai sampel adalah SKPD yang berbentuk:
  - a. Dinas;
  - b. Badan;
  - c. Kecamatan; dan
  - d. Lain-lain (Kantor, kesekretariatan).
3. Sampel diprioritaskan pada bagian yang berkaitan secara langsung dengan kegiatan inventarisasi aset, penilaian aset, legal audit dan kualitas LKPD.

Menurut Gay di dalam buku Husein Umar (2008 : 79) menyatakan bahwa untuk penelitian deskriptif dapat diwakili oleh 10 persen dari populasi (minimal 20% untuk populasi yang sangat kecil). Dengan adanya pertimbangan tersebut maka ukuran sampel yang diambil adalah 20% dari jumlah populasi yaitu 8 SKPD ( $20\% \times 38 \text{ SKPD} = 7,6 \approx 8 \text{ SKPD}$ ).

Sampel yang ditentukan dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 SKPD dengan perhitungan sebagai berikut:

- Dinas :  $\frac{17 \text{ Dinas}}{38 \text{ SKPD}} \times 15 \text{ SKPD} = 6,71 \approx 7 \text{ Dinas}$
- Badan :  $\frac{5 \text{ Badan}}{38 \text{ SKPD}} \times 15 \text{ SKPD} = 1,97 \approx 2 \text{ Badan}$
- Kecamatan :  $\frac{10 \text{ Dinas}}{38 \text{ SKPD}} \times 15 \text{ SKPD} = 3,947 \approx 4 \text{ Kecamatan}$
- Lain-lain :  $\frac{6 \text{ SKPD}}{38 \text{ SKPD}} \times 15 \text{ SKPD} = 2,36 \approx 3 \text{ SKPD}$

Berdasarkan perhitungan sampel diatas, maka penulis mengambil sampel dalam penelitian ini sebanyak 16 SKPD, dengan responden sebagai berikut:

- Responden merupakan pengelola barang pengguna (pengelola barang SKPD/Pengurus Barang Pengguna);
- Responden merupakan bagian aset BPKAD, yang terdiri dari pejabat fungsional dan petugas rekonsiliasi/sensus barang milik daerah; dan
- Responden merupakan bagian akuntansi dari SKPD sampel.

Sehingga jumlah anggota sampel dalam penelitian ini adalah 16 SKPD dengan responden 2 orang per SKPD, sehingga jumlah N adalah  $16 \text{ SKPD} \times 2 = 32$ .

**Tabel 3.4**  
**Sampel Penelitian**

<b>Kelompok SKPD</b>	<b>Nama SKPD</b>
Dinas	1. Dinas Komunikasi dan Informatika
	2. Dinas Pendidikan
	3. Dinas Lingkungan Hidup
	4. Dinas Sosial
	5. Dinas Tenaga Kerja
	6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	7. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Badan	1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	2. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kecamatan	1. Kecamatan Cipedes
	2. Kecamatan Kawalu
	3. Kecamatan Tawang
	4. Kecamatan Cibeureum
Lain-lain	1. Inspektorat
	2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	3. Sekretariat Daerah
<b>Jumlah</b>	<b>16 SKPD</b>

#### **3.2.2.4 Skala Pengukuran**

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut apabila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2018:92).



Pada penelitian ini, penulis menggunakan skala pengukuran yaitu skala *Likert*. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut variabel penelitian (Sugiyono, 2018:93).

Dalam skala *Likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Skala *Likert* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *itemized rating scale* (skala nilai terperinci), yang dimana skala ini memberikan keleluasaan untuk menggunakan sebanyak mungkin gradasi item/poin instrumen yang dianggap perlu (4, 5, 7, 9 atau lebih) serta memungkinkan untuk menggunakan item instrumen yang berbeda (seperti sangat tidak penting sampai sangat penting, sangat rendah sampai sangat tinggi, dll). Skala nilai terperinci (*itemized rating scale*) sering digunakan dalam penelitian bisnis karena dianggap cocok untuk mengadaptasi jumlah item yang digunakan, serta nomenklaturnya dianggap perlu untuk memenuhi kebutuhan para peneliti untuk mendefinisikan variabel. Ketika item instrumen netral tersedia, maka nilai pengukuran dikatakan seimbang serta jika item instrumen netral tidak tersedi, maka nilai pengukuran dikatakan tidak seimbang. Penelitian mengindikasikan bahwa skala 5 poin sama bagusnya dengan skala apa pun, dan peningkatan dari skala 5 point menjadi 7 poin atau 9 poin pada skala nilai (*rating scale*) tidak meningkatkan keandalan nilai (Uma Sekaran, 2000:200, diterjemahkan oleh penulis).

Dalam pengisian kuesioner ini para responden dituntut untuk dapat menilai seberapa baik responden dalam melaksanakan faktor-faktor penting mengenai inventarisasi aset, penilaian aset dan legal audit yang kaitannya dengan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Kepentingan dan kinerja diukur dengan skala *Likert* dari 1 sampai 5.

Menurut Sugiyono (2018:92), untuk keperluan analisis kuantitatif maka item instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- SS = Sangat setuju/selalu/sangat positif, diberi skor = 5
- S = Setuju/sering/positif, diberi skor = 4
- TP = Tidak Memberikan Pendapat/ragu/netral diberi skor = 3
- TS = Tidak setuju/hampir tidak pernah/negatif, diberi skor = 2
- STS = Sangat tidak setuju/tidak pernah, diberi skor = 1

Jumlah skor ideal (tertinggi) untuk seluruh item adalah 5 x jumlah responden, sedangkan skor terendah adalah 1 x jumlah responden. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah *purposive sampling* pada jabatan dan pekerjaan yang membidangi pengelolaan aset dan pada bagian akuntansi Pemerintah Kota Tasikmalaya atau pada masing-masing SKPD sebagai pengguna dan pengelola aset serta bidang yang menjalankan kegiatan akuntansi.

Adapun teknik perhitungannya adalah sebagai berikut:

1. Setiap responden memilih 1 item, kemudian dikalikan skor item yang dipilih;
2. Hasil perkalian dijumlahkan; dan
3. Hasil penjumlahan tersebut yang menentukan posisi item.

### 3.2.2.5 Instrumen Penelitian

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Meneliti dengan data yang sudah ada lebih tepat kalau dinamakan membuat laporan dari pada melakukan penelitian. Namun demikian dalam skala yang paling rendah laporan juga dapat dinyatakan sebagai bentuk penelitian (Emory 1985) seperti yang dikutip Sugiyono (2018:102).

Karena pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian.

Instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam ilmu alam sudah banyak tersedia dan telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Jumlah instrumen penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Instrumen untuk mengukur inventarisasi aset;
2. Instrumen untuk mengukur penilaian aset;
3. Instrumen untuk mengukur legal audit; dan
4. Instrumen untuk mengukur kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

**Tabel 3.5**  
**Instrumen Penelitian**

<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>	<b>No Item Pertanyaan</b>
Inventarisasi aset (X1)	1. Inventarisasi fisik	Keberadaan fisik barang, dan Kondisi aset	IA 1, 2, 3, 4
	2. Inventarisasi yuridis/legal (Siregar, 2004: 518-520)	<i>Labelling</i> , Kelengkapan dokumen aset, Otorisasi/legalitas dokumen.	IA 5, 6, 7, 8, 9, 10
Penilaian aset (X2)	Penilaian Barang Milik Daerah dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.  (PP No. 27 tahun 2014)	Penilaian melibatkan jasa penilai independen/ appraisal, Penilaian aset dalam neraca	PA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Legal audit (X3)	1. Inventarisasi status penguasaan aset	Kelengkapan dokumen penguasaan aset, Penggolongan status penguasaan/ penggunaan aset.	LA 1, 2, 3, 4
	2. Identifikasi aset	Klasifikasi jenis aset, Aset dimanfaatkan sesuai ketentuan.	LA 5, 6, 7, 8
	3. Prosedur penugasan/ pengalihan aset	Pengalihan aset dilengkapi dengan dokumen, Pengawasan pengalihan aset, Pencatatan mutasi aset.	LA 9, 10, 11, 12, 13, 14
	4. Tindakan hukum atas pelanggaran hak  (Siregar, 2004: 518-520)	Sanksi penggunaan aset, Sanksi material berupa penggantian kerugian.	LA 15, 16, 17, 18
Kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Tasikmalaya (Y)	1. Relevan	Memiliki manfaat untuk masa mendatang, Tepat waktu, Lengkap	KLKPD 1, 2, 3, 4, 5, 6
	2. Andal	Jujur, Dapat diverifikasi, Netral.	KLKPD 7, 8, 9, 10, 11, 12
	3. Dapat dibandingkan	Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, Dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan yang sama	KLKPD 13, 14, 15, 16
	4. Dapat dipahami	Dapat difahami oleh pengguna/ tidak bias, Menyediakan informasi	KLKPD 17, 18, 19, 20

### 3.2.2.6 Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan, maka dibutuhkan data dan informasi yang mendukung penelitian ini. Dalam memperoleh data dan informasi, maka penulis mengumpulkan data berupa :

#### 1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian secara langsung guna memperoleh data primer yang diperlukan dalam kaitannya dengan penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data primer adalah sebagai berikut :

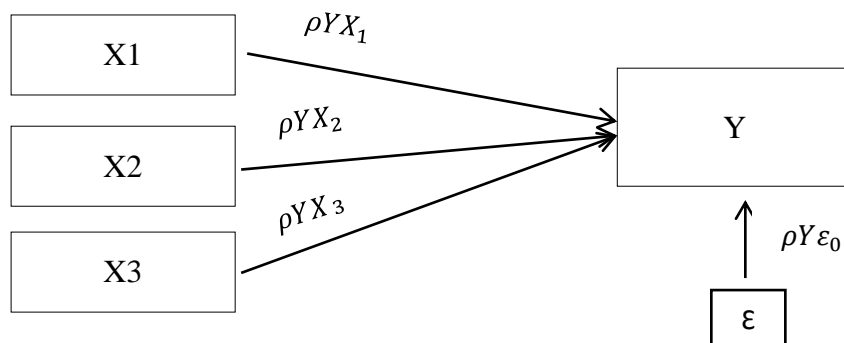
- a. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara penulis dengan pihak yang memberikan informasi. Dengan cara ini diharapkan dapat memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta penjelasannya secara langsung;
- b. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis kepada staf Pengurus Barang Pengguna SKPD, bagian aset BPKAD dan bagian akuntansi/keuangan dari masing-masing SKPD Kota Tasikmalaya;
- c. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan keyakinan bahwa data yang diperoleh sebelumnya adalah benar.

## 2 Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini dilaksanakan untuk memperoleh data-data sekunder guna mendukung data-data primer yang diperoleh selama penelitian. Data sekunder ini diperoleh dari buku-buku serta referensi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 3.3 Paradigma Penelitian

Dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen (variabel bebas), yang menjadi variabel independennya adalah Inventarisasi Aset ( $X_1$ ), Penilaian Aset ( $X_2$ ), dan Legal Audit ( $X_3$ ). Sedangkan yang menjadi variabel dependen pada penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya ( $Y$ ). Paradigma penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 3.2**  
**Paradigma Penelitian**

Keterangan :

$X_1$  = Inventarisasi Aset

$X_2$  = Penilaian Aset

$X_3$  = Legal Audit

$\epsilon$  = Faktor lain yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Tasikmalaya

$\rho_{YX_1}$  = Koefisien jalur variabel  $X_1$  terhadap Y

$\rho_{YX_2}$  = Koefisien jalur variabel  $X_2$  terhadap Y

$\rho_{YX_3}$  = Koefisien jalur variabel  $X_3$  terhadap Y

### 3.4 Teknik Analisis Data

Analisis ini bermaksud untuk menggambarkan karakteristik masing-masing penelitian dengan cara menyajikan data kedalam tabel distribusi frekuensi, menghitung nilai rata-rata, skor total, dan Tingkat Capaian Responden (TCR) serta menginterpretasikannya. Penelitian ini tidak membandingkan atau menghubungkan-hubungkan satu variabel independen dengan variabel independen lainnya. Untuk mencari TCR digunakan rumus sebagai berikut:

$$TCR = \frac{\text{Rata-rata skor}}{5} \times 100\%$$

Dimana kriteria hasilnya adalah sebagai berikut:

- 0,00% - 54,99%                      Tidak Baik
- 55,00% - 64,99%                    Kurang baik
- 65,00% - 79,99%                    Cukup Baik
- 80,00% – 89,99%                    Baik
- 90,00% – 100,00%                   Sangat Baik

*Sumber: Ari Kunto (2002:65)*

Untuk pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan alat uji regresi berganda (*multiple regression*) dengan menggunakan bantuan *software* statistik komputer SPSS versi 23.0. Model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian dapat dirumuskan seperti berikut ini.

$$KLKPD = a + b_1INV + b_2NIL + b_3LA + \epsilon$$

Keterangan :

KLKPD            = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a                    = Konstanta

bi	= Angka arah atau koefisien regresi
INV	= Inventarisasi aset
NIL	= Penilaian aset
LA	= Legal Audit
$\epsilon$	= <i>Epsilon</i> , faktor lain yang tidak disebutkan dalam model.

### 3.4.1 Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keabsahan dan kevalidan suatu alat ukur atau instrumen penelitian. Validitas menunjukkan seberapa baik suatu instrumen yang dibuat mengukur konsep tertentu yang ingin diukur (Bougie dan Uma Sekaran, 2013:226, diterjemahkan oleh penulis) Karena penelitian menggunakan kuesioner didalam pengumpulan data penelitian, maka dilakukan uji validitas untuk mengetahui apakah kuesioner yang disusun telah mampu mengukur apa yang ingin diukur.

Uji validitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi dari masing-masing pernyataan dengan skor total. Rumus yang digunakan adalah produk moment (*product moment*) sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n\sum x^2 - (\sum x)^2)(n\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Sumber : Sugiyono (2018:183)

Keterangan :

r	= Koefisien korelasi
x	= Skortiap item variabel x
y	= Jumlah skor seluruh item variabel x
n	= Jumlah responden



Jika dari hasil analisis tersebut diperoleh  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka data tersebut adalah signifikan (valid) berarti layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis. Kemudian dapat ditentukan bahwa pernyataan-pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini valid, maka dilanjutkan dengan uji reliabilitas.

### 3.4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur pada kuisioner, maksudnya adalah untuk mengukur apakah suatu alat ukur akan mendapatkan pengukuran yang tetap konsisten jika pengukuran diulang kembali (Duwi Priyatno, 2017:79).

Teknik yang digunakan untuk mengukur reliabilitas ialah teknik *Cronbach's Alpha*. Pengujian reliabilitas dengan teknik *Cronbach's Alpha* ini dilakukan untuk jenis data interval (Sugiyono, 2013: 365). *Cronbach's Alpha* dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\alpha = \left[ \frac{k}{k-1} \right] \left[ 1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Sumber: A. Gima Sugiyama (2008:199)

Keterangan :

$\alpha$  = Koefisien reliabilitas alpha

$k$  = Banyak butir pertanyaan dan butir soal

$\sum \sigma_b^2$  = Jumlah variasi butir

$\sigma_t^2$  = Variasi total

Uji reliabilitas dilakukan dengan cara menghitung nilai *cronbach alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Nilai *cut off* untuk menentukan

reliabilitas suatu instrumen adalah nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60 (Firdaus Hamta, 2015:151).

### **3.4.3 Uji Asumsi Klasik**

#### **3.4.3.1 Uji Normalitas**

Menurut Duwi Priyatno (2017:85), menyebutkan bahwa uji normalitas data dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Salah satu cara agar data dapat berdistribusi normal adalah dengan menggunakan pengamatan nilai residual. Cara lain dengan melihat distribusi dan variabel-variabel yang akan diteliti. Walaupun normalitas suatu variabel tidak selalu diperlukan dalam analisis akan tetapi hasil uji statistik akan lebih baik jika semua variabel berdistribusi normal.

Teknik uji normalitas yang digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas ini dilakukan terhadap distribusi variabel Inventarisasi Aset, Penilaian Aset, dan Legal Audit Kriteria dalam pengujian normalitas dalam pengujian ini adalah jika *p-value* lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitian 5%, maka data variabel terdistribusi secara tidak normal. Jika *p-value* lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian 5%, maka data variabel terdistribusi secara normal.

#### **3.4.3.2 Uji Multikolinieritas**

Multikolinieritas berarti antar variabel independen yang tercatat dalam model regresi memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1). Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebasnya. Konsekuensi adanya multikolinieritas adalah koefisien

korelasi tidak tentu dan kesalahan menjadi sangat besar (Duwi Priyatno, 2017:120).

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen yang lainnya sama dengan nol. Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat *tolerance value* dan *value inflating factor* (VIF). Nilai yang umum dipakai adalah *tolerance value* 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10 (Imam Ghozali, 2001 seperti yang dikutip Duwi Priyatno, 2017:120).

#### **3.4.3.3 Uji Heteroskedastisitas**

Menurut Duwi Priyatno (2017:126) menyebutkan bahwa heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan didalam model regresi. Pada regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Jenis-jenis uji heteroskedastisitas antara lain adalah dengan uji koefisien korelasi spearman's rho, dan uji glejser.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, dalam penelitian ini menggunakan Uji Glejser. Apabila nilai signifikansi  $> 0,05$  maka terjadi homoskedastisitas dan ini yang seharusnya terjadi, namun jika sebaliknya nilai signifikansi  $< 0,05$  maka terdapat heteroskedastisitas.

### 3.4.3.4 Uji Autokorelasi

Menurut Duwi Priyatno (2017:123) menyebutkan bahwa autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu atau tempat. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan uji *Durbin-Watson (DW test)*.

Pengambilan keputusan pada uji *Durbin Watson* adalah sebagai berikut :

1.  $DU < DW < 4-DU$  maka  $H_0$  diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi.
2.  $DU < DW$  atau  $DW > 4-DL$  maka  $H_0$  ditolak, artinya terjadi autokorelasi.
3.  $DL < DW < DU$  atau  $4-DU < DW < 4-DL$ , artinya tidak ada kesimpulan yang pasti.

### 3.4.4 Uji Hipotesis

#### 3.4.4.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) dilihat pada hasil pengujian regresi berganda untuk variabel independen dan variabel dependen dengan bantuan program SPSS versi 23.0. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sehingga dalam penelitian ini digunakan nilai *adjusted*  $R^2$  untuk menilai model regresi, karena

nilai *adjusted R<sup>2</sup>* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

Sedangkan menurut Sugiyono (2018:184) menyebutkan bahwa untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi dikategorikan menjadi sangat rendah, rendah, sedang, kuat, dan sangat kuat.

**Tabel 3.6**  
**Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat Kuat

*Sumber : Sugiyono (2018:184)*

#### **3.4.4.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)**

Uji statistik t merupakan pengujian masing-masing variabel independen yang dilakukan untuk melihat apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Uji statistik t dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%, dengan kriteria pengujian:

1. Jika  $\rho > \alpha$ , maka  $H_0$  diterima, variabel bebas secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.
2. Jika  $\rho < \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak, variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel terikat

Secara ringkas pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

$H_{01}, \rho_{YX_1} = 0$  : Inventarisasi Aset tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

- Ha<sub>1</sub>,  $\rho_{YX_1} \neq 0$  : Inventarisasi Aset berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- Ho<sub>2</sub>,  $\rho_{YX_2} = 0$  : Penilaian Aset tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- Ha<sub>2</sub>,  $\rho_{YX_2} \neq 0$  : Penilaian Aset berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- Ho<sub>3</sub>,  $\rho_{YX_3} = 0$  : Legal Audit tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- Ha<sub>3</sub>,  $\rho_{YX_3} \neq 0$  : Legal Audit berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- Ho<sub>4</sub>,  $\rho_{YX_1, X_2, X_3} = 0$  : Inventarisasi Aset, Penilaian Aset, dan Legal Audit tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- Ha<sub>4</sub>,  $\rho_{YX_1, X_2, X_3} \neq 0$  : Inventarisasi Aset, Penilaian Aset, dan Legal Audit berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

#### 3.4.4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan kelayakan model untuk digunakan dalam pengujian hipotesis. Uji statistik F dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%, dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

1. Jika  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ , maka Ho diterima.
2. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka Ho ditolak.